

## **PUBLIKASI ILMIAH**

### **PENERAPAN KETENTUAN RESTITUSI KASUS TPPO DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**AGUS HASANUDIN**

**A.21211010**

**Dr. Sy. HASYIM .AZ, SH., M.Hum**

**MEI SULAWESI YANTO SH.,MH**

#### **ABSTRAK**

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu kasus tindak pidana. Perdagangan Orang mengakibatkan korban mengalami penderitaan baik fisik, psiskis ekonomi dan sosial. Setelah diberlakukanya Undang undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat lebih efektif. Konsep pertanggung jawaban ganti kerugian juga telah diatur dalam aspek penting dalam penegakan hukum. Namun dalam prakteknya putusan (vonis) perkara tindak pidana perdagangan orang jarang memuat restitusi. Tetapi ada dalam hasil putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 1633/PID.B/2009/PN.TK, atas nama Fitriyani Binti Muradi yang merupakan satu-satunya putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menghukum pelaku untuk membayar restitusi kepada korban. Hal ini dipengaruhi oleh belum jelasnya prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan beberapa faktor kendala lainnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis – empiris. Dalam memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penellitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang diatur secara tersendiri dalam Undang undang tindak pidana Perdagangan Orang dan mengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kendala dalam penerapan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu : 1. Faktor peraturan perundang undangan; 2.faktor sumber daya manusia; 3. Faktor korban. Upaya yang harus dilakukan agar Restitusi dapat diterapkan pada perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu : ketentuan mengenai restitusi perlu direvisi, dibuatkan peraturan pelaksana mengenai prosedur pengajuan restitusi oleh masing masing lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas SDM para penegak hukum, koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi penegak hukum, kesepahaman antara penegak hum atau instansi, sosialisasi kepada masyarakat terutama korban mengenai tindak pidana perdagangan orang dan masalah restitusi. kemudian kendala dari kurangnya kesadaran penegak hukum dan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dalam memperjuangkan hak restitusi korban. Selanjutnya, kendala dari kesadaran hukum korban, yang mana korban beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka menjadi apatis.

Kata Kunci :  
Perdagangan Orang, Restitusi

## ABSTRACT

Victims of crime is basically a party that suffered most in a crime. Trafficking in person has caused the victims to suffer physically, psychologically, economically, socially. After the effectiveness of the Law No. 21 of the year 2007 on combating against the criminal acts of trafficking in person, it is expected that the law enforcement towards the criminal acts of the trafficking in person can be more effective. The concept of compensation liability has also been governed as an important aspect in law enforcement. However in the practice, the decision (the verdict) of the trafficking in person criminal act case rarely contains restitution. But there is an the decision of the Court of Tanjung Karang number 1633/PID.B/2009/PN.TK, in the name of Fitriyani Binti Muradi which is the only decision that sentenced the offender to pay restitution to victims. This is caused by the unclear procedure to file restitution for the victims of trafficking in person criminal acts and other obstacles. This is research used the judicial – empirical research. In obtaining data, library research and field research in a form of interview with informants have been conducted. From the research results obtained, it is concluded that the procedure of filling restitution in the case of trafficking in person criminal acts is governed separately in of the Law No. 21 of the year 2007 on combating against the criminal acts of trafficking in person and also refers to KUHAP (Penal code) expect otherwise determined by of the Law No. 21 of the year 2007 on combating against the criminal acts of trafficking in person. The obstacles of the restitution application in the case of trafficking in person criminal acts could be clasified in 3 (three) groups : 1. Law and regulation factor; 2. Human resources of law enforcers factor; 3. Victims legal consciousness factor. The effort which must be done to the restitution application in the case of trafficking in person criminal acts are to revise the provisions the restitution in of the Law No. 21 of the year 2007 on combating against the criminal acts of trafficking in person, to make the implementation regulation on the procedure of filing restitution by each law enforcement application, to increase the human resources quality of the law enforcers, to coordinate and cooperate well with the law enforcer of the trafficking in person to introduce the trafficking in person criminal acts and restitution issues to the society. then the constraint of lack of awareness of law enforcement and human resources are trained and skilled in fighting for the restitution rights of victims. Furthermore, the constraints of the legal consciousness of the victim, where the victim thinks that if their demands compensation she has received the results not comparable to those he experienced (can not restore the original state) even if it is also assumed to compensation claims will only add to the suffering and loss other so that they become apathetic.

Key Words :

Trafficking in person, Restitution

## Pendahuluan

Indonesia di mata dunia, ditengarai sebagai negara dengan kasus *trafficking* yang cukup tinggi, tidak saja sebagai negara pengirim (sumber) *trafficking* dan transit untuk *trafficking* internasional, tetapi juga negara penerima. Dalam konteks tersebut di atas, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi rendah dan mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak dengan tingkat populasi yang sangat tinggi, mempunyai potensi yang sangat besar terhadap munculnya perdagangan manusia atau kejahatan lainnya. Krisis perekonomian yang terjadi di Indonesia berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menyempitnya lapangan pekerjaan, sedangkan pada sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang sangat rumit dipecahkan. Dampak dari hal tersebut menjadikan faktor kriminogen timbulnya berbagai macam kejahatan antara lain kejahatan terhadap nyawa, tubuh, harta benda, dan kesusilaan. Salah satu bentuk kejahatan yang timbul berkaitan persoalan ketenagakerjaan adalah tertipunya tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Persoalan tertipunya tenaga kerja dapat terjadi sejak saat rekruting maupun pada tahap pelaksanaan perjanjian kerja.

Pada umumnya pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin mendesak membuat mereka mau melakukan apa saja untuk bertahan hidup, dari kondisi ini banyak dimanfaatkan sekelompok orang untuk mencari keuntungan, berupa pengiriman tenaga kerja secara *illegal*. sehingga mereka terjatuh pada persoalan-persoalan hukum, untuk menghindari hal tersebut mereka terpaksa mencari perlindungan pada broker-broker tenaga kerja yang mau memperkerjakan walaupun dengan upah yang sangat rendah dan tidak mendapat perlindungan hukum. bahkan tenaga kerja dieksploitasi habis-habisan dan terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, fenomena ini merupakan pelanggaran hukum dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pada umumnya yang menjadi korban adalah kaum wanita. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *trafficking* atau perdagangan manusia, kejahatan semacam ini tidak saja terjadi di wilayah hukum Negara Indonesia, tetapi juga dapat terjadi pada wilayah negara lain, terutama negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan yang menjadi korban adalah warga negara Indonesia.

Oleh karena warga negara Indonesia mempunyai potensi munculnya tindak pidana perdagangan orang, maka sesuai dengan salah satu tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, maka arahnya adalah untuk melindungi warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk *trafficking*, dan sebagai salah satu wujud keprihatinan yang sangat mendalam terhadap berbagai kasus *trafficking* yang terjadi di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang Undang khusus sebagai bukti bahwa Pemerintah Indonesia tidak menutup mata ataupun tinggal diam atas beberapa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan memeberlakukan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau biasa disebut Human Trafficking. Lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2007 selain memberikan landasan hukum dalam menanggulangi perdagangan orang, di mana adanya pengaturan mengenai definisi perdagangan orang dan tindakan tegas terhadap pelaku perdagangan orang. Dalam UU ini juga memberikan kejelasan mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi perdagangan manusia, di antaranya keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka, serta pemberian rehabilitasi medis dan sosial dari negara.

Undang Undang No 21 Tahun 2007 secara tegas melarang segala bentuk perdagangan orang , bahkan hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah mendapat ganjaran penjara minimal 3 sampai 15 tahun ditambah dengan denda 120 juta hingga 600 juta rupiah, jika korban meninggal dunia ancaman hukuman bertambah menjadi seumur hidup ditambah denda 200 juta hingga 5 milyar rupiah. Hukuman ini cukup berat dan sebanding dengan yang diberlakukan untuk kejahatan serius lainnya.

Bahkan di dalam Undang Undang No 21 Tahun 2007 telah memberikan jaminan pemberian hak bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diantaranya Hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua, hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, hak untuk mendapat restitusi, hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan

reintegrasi sosial dari pemerintah, dan juga hak bagi korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara.

Pemberian hak atas korban yang diatur dalam Undang Undang No 21 Tahun 2007 tersebut diatas memberikan kontribusi pada perlindungan hak atas korban bahwa hak-hak korban penting dalam proses pemidanaan dan bukan menghukum pelaku saja. Karena korban telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan, orang yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang tercantum pada pasal 48 ayat 1 Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatas memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Kenyataan di lapangan jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menerima restitusi. Perhatian terhadap kepentingan korban dapat dipandang sebagai unsur penting dalam kerangka upaya penegakan hukum secara benar dan tepat.

Sejak diberlakukan dan disahkannya Undang Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya terdapat 1 (satu) kasus perdagangan orang yang dikabulkan hak restitusi yang di putus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.Reg 1663/Pid/B/2008/PN TK, atas nama terdakwa Fitriyani Binti Muradi. Hak Restitusi yaitu 10 juta rupiah<sup>1</sup>, Jika dilihat dari nominal angka penjatuhan restitusi memang tidak terlalu besar namun putusan ini setidaknya menjadi bahan pembelajaran bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk mencantumkan hak restitusi ini menjadi bagian hak korban dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang.

Pada pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 dan putusan diatas dapat dilihat bahwa bentuk ganti kerugian yang disebut restitusi itu dalam bentuk uang. Dengan demikian tujuan ganti rugi yaitu pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. Ada beberapa komponen terkait hak restitusi korban yang harus diganti pelaku terhadap korban yaitu kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan korban, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Dalam Undang undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hak restitusi sebagai salah satu hak-hak korban tindak

---

<sup>1</sup>Angus McGilvary , *Data IOM dalam Training Penanganan Tindak Pidana perdagangan orang*, Hotel santika Pontianak 4-7 september 2012

pidana perdagangan orang, seharusnya menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya melalui aparat penegak hukum. Sebagaimana menurut Barda Nawawi yang menyatakan terdapat berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.<sup>2</sup> Tetapi yang kita lihat dalam hal ini korban kejahatan tidak memperoleh hak restitusi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Akibatnya setelah pelaku kejahatan dijatuhi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak diperdulikan. Orang hanya memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya pada komponen penjahat, undang-undang, dan penegak hukum serta interaksi antar ketiga komponen tersebut.

Hak Restitusi lebih diarahkan kepada tanggung jawab terpidana terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukannya, dan sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur untuk menentukan jumlah atau besar kecilnya ganti kerugian dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tidak menentukan secara tegas namun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 hanya menjelaskan bahwa restitusi adalah hak korban atau ahli warisnya dan restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, tidak dijelaskan ukuran besar atau indikator jumlah restitusi dan layak tidaknya ganti rugi yang diberikan. Memang dalam prakteknya hak restitusi untuk korban tindak pidana perdagangan orang sangat banyak kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak bagi korban baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pelaksanaan putusan. Aparat Penegak Hukum kita memberi pemahaman bahwa korban berhak mengajukan hak restitusi, tetapi dalam prakteknya aparat penegak hukum kita juga belum memahami mekanisme dalam mencantumkan hak restitusi bagi korban perdagangan orang.

Restitusi termasuk dalam sebuah paradigma baru dalam dunia peradilan pidana, tentu perlu waktu untuk memperkenalkan restitusi di tengah sistem hukum yang telah diakui secara turun-menurun. Belum lagi pemikiran pragmatis cenderung mendominasi pemikiran aparat penegak hukum kita. Yakni, sikap ogah menerima perkembangan baru dan lebih mengutamakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau “kitab suci” sebagai acuan penegakan hukum. Berbagai upaya perbaikan dan pengembangan suatu sistem hukum tentu sangat diperlukan di

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.55.

tengah pesatnya kejahatan jenis baru yang semakin canggih dan modern. Pengembangan ini berbanding lurus dengan meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum dan kualitas perangkat hukum normatif yang ada

Beberapa kasus, hakim dalam menjatuhkan putusan dinilai kurang menguntungkan pihak korban, hal ini disebabkan karena hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi pelaku kurang memperhatikan hak-hak para korban tindak pidana atau kejahatan. Apabila dijabarkan berarti kedudukan korban sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, korban kejahatan dalam peradilan pidana harus diberi perlindungan hukum termasuk penegakan hukum terhadap hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu tuntutan restitusi, hakim juga terikat dengan hukum acara yang ada yang mengatur sejak memeriksa dan memutus dan dari hasil pemeriksaan itulah yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam penjatuhan amar putusan, sehingga sangat perlunya kerjasama dalam tahap penyidikan oleh penyidik Kepolisian kendala yang terjadi adalah korban enggan mengikuti proses persidangan yang panjang dan juga perbedaan pendapat antara polisi dan jaksa terhadap laporan saksi dan/atau korban dalam proses penyidikan. dan dalam tahapan Penuntutan oleh Kejaksaan kendala lain yang dihadapi oleh Jaksa yaitu tidak adanya barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang disita untuk jaminan pemenuhan/pembayaran restitusi.

Jaksa dalam melakukan penuntutan, banyak mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi, permintaan restitusi mesti di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran dan saksi-saksi ahli untuk menentukan besar kecilnya ganti kerugian tersebut. Dan juga jika Tersangka tidak membayar dan memilih untuk tambahan kurungan, sementara tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi ini sangat ringan yaitu maksimum satu tahun kurungan.

Kesulitan yang dihadapi polisi dan jaksa adalah dalam menentukan berapa besaran restitusi yang menjadi hak saksi korban dan menghadirkan saksi ahli. Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, para Jaksa menghadapi kendala dalam mengeksekusi putusan restitusi untuk saksi dan/atau korban, karena aplikasi penyitaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik terpidana belum ada dasar hukum untuk penyitaan.



## **Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Restitusi sulit diterapkan kepada Pelaku untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan orang?
2. Bagaimana Seharusnya Restitusi dapat diterapkan kepada Pelaku untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan orang berdasar pasal 48 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## **Pembahasan**

### **1. Mengapa Restitusi sulit diterapkan kepada Pelaku untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan orang?**

Dalam penerapan restitusi memang tidak hanya satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi harus ada keterpaduan dan kerjasama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana perdagangan orang berdasar pasal 48 Undang undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga harus bisa dilihat dari 3 penegak hukum yaitu Kepolisian selaku Penyidik, Kejaksaan selaku penuntut dan Kehakiman selaku pembuat Putusan. Karena tidak bisa Hakim membuat putusan pembebanan Restitusi kepada pelaku tanpa ada tuntutan dari Jaksa dan sebaliknya Jaksa tidak bisa membuat dasar tuntutan tanpa adanya pemeriksaan Penyidik kepolisian kepada Korban dan yang paling penting adalah pemahaman korban akan hak korban mendapatkan Restitusi.

Restitusi didalam Pasal 48 Undang undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat jarang diterapkan walaupun pernah ada satu kasus yang sudah incraht yaitu kasus perdagangan orang yang dikabulkan hak restitusinya yang di putus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.Reg 1663/Pid/B/2008/PN TK, atas nama terdakwa Fitriyani Binti Muradi.

Penerapan Restitusi sulit dilaksanakan dan cenderung hanya sebagai wacana yaitu karena :

1. Dalam Hal Undang undang

Undang undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan peraturan perundang undangan dengan asas legalitasnya yaitu “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya” berawal dari peraturan perundang undangan yang ada dalam Undang undang No 21 Tahun 2007 tersebut hambatan susahnya restitusi diterapkan adalah :

- a. Dalam pasal 48 ayat 1 Undang undang No 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Prosedur pengajuan restitusi dalam penjelasan pasal tersebut kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya
- b. Tidak Jelasnya ketentuan dalam pengajuan restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48 ayat 1 Undang undang No 21 Tahun 2007 mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas dan terperinci oleh peraturan perundang undangan.
- c. Pasal 48 ayat 5 Undang undang No 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa maksud dalam Undang undang tersebut adalah untuk menjamin dapat terlaksananya putusan restitusi untuk korban atau ahli warisnya, tetapi pasal ini tidak disertai mekanisme penitipan.
- d. Dalam Pasal 50 ayat 4 Undang undang No 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa jika pelaku tidak membayar maka hanya akan dikenai pidana kurungan 1 tahun sedangkan tujuan dari restitusi adalah restitusi, dan juga jika restitusi cukup besar dikenakan kepada pelaku maka pelaku lebih memilih kurungan 1 tahun.
- e. Kurang adanya peraturan internal dari masing masing instansi penegak hukum tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan pengajuan restitusi.
- f. Ada polarisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian restitusi kepada korban kejahatan yang cenderung saling bertentangan.
- g. Tumpang-tindihnya pengaturan mengenai restitusi terhadap korban kejahatan. Setidaknya ada tiga peraturan yang mengatur tentang

pemberian restitusi terhadap saksi dan korban kejahatan, yakni PP Nomor 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; PP Nomor 3/2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat; serta UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- h. Dalam UU Nomor 13/2006, jangkauan restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sedangkan dalam KUHAP tentang ganti kerugian hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana.
- i. Lemahnya daya paksa dan eksekusi pelaksanaan restitusi. UU Nomor 13/2006 tidak mengatur tentang daya paksa untuk melakukan pembayaran dan lembaga mana yang berwenang mengeksekusi pelaksanaan restitusi tersebut.

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam menerapkan Restitusi Tindak Pidana perdagangan orang aparat penegak hukum adanya keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas dan hal itu sangat mempengaruhi diterapkannya restitusi tindak pidana perdagangan orang dari hasil pengamatan dan pengalaman penulis juga terdapat beberapa masalah yang menghambat dalam faktor sumberdaya manusia antara lain :

- a. Kurang ahlinya dan kurang pahamnya aparat penegak hukum baik polisi jaksa dan hakim dalam hal tindak pidana perdagangan orang khususnya tentang restitusi
- b. Dalam memperhitungkan pemberian ganti rugi immateriel tersebut tidaklah mudah, salah satunya dengan kesaksian dari ahli, psikolog atau saksi pendamping, keluarga, rohaniawan, teman dekat, atau petugas unit pelayanan perempuan dan anak.
- c. Pemahaman tentang Tindak Pidana Perdagangan antara aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim tidak sama sehingga koordinasi antara instansi agak susah

- d. Tidak memahami bagaimana cara memasukkan restitusi dalam berita acara pemeriksaan ataupun penuntutan.
- e. Penyidik terbentur dengan batas waktu penahanan tersangka
- f. Kurangnya penegak Hukum
- g. Penegak hukum lebih banyak fokus kepada pembuktian tindak pidana tersangka dan tidak pernah mencari pembuktian terhadap kerugian yang diderita oleh korban
- h. Penyidik dalam memeriksa korban terhambat dengan keadaan dimana korban merasa dihambat .
- i. Penuntut umum kesulitan saat penyidik tidak memasukkan dalam pemeriksaan tentang kerugian yang diderita korban beserta alat bukti saksi dan lainnya .

### 3. Korban

Kesadaran hukum korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang banyak yang tidak mau bahkan takut saat akan melaporkan adanya kejahatan terhadap dirinya kepada kepolisian karena berbagai macam alasan ditambah dengan masih kurangnya sosialisasi perlindungan hukum kepada saksi dan korban di Indonesia. Beberapa faktor susah diterapkannya restitusi dalam hal korban tindak pidana perdagangan orang adalah :

- a. Tidak adanya informasi lengkap dan akurat kepada korban pada tahap penyidikan dan/atau penuntutan akan memungkinkan korban membangun kerjasama yang baik dengan penegak hukum. .
- b. Korban merasa tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan keteranganya terkait kerugian yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang
- c. Takut akan mendapatkan kesulitan saat akan mengajukan tuntutan karena belum merasa terlindungi dan merasa saat dilakukan pemeriksaan bukan seperti korban tetapi pelaku <sup>3</sup>
- d. Merasa memang nasibnya sudah demikian atau dalam bahasa jawa *nrimo ing pandum* dan juga merasa tidak mempunyai pendukung dalam mengajukan tuntutan restitusinya<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Korban TKI diperbatasan Malaysia Entikong Kalbar Agustus 2013

- e. Tidak ingin membuat susah atau tidak ingin mempersulit diri dengan mengadakan tuntutan restitusi .
- f. Hasil jerih payahnya menuntut restitusi tidak seimbang dengan kerugian yang diderita dan sulitnya tahapan atau proses tuntutan restitusi.
- g. Malu akan peristiwa tindak pidana perdagangan orang tersebut dan bermaksud agar tidak diketahui oleh khalayak ramai.

Jika dalam hal adanya kelemahan dan ancaman yang membuat penerapan restitusi belum bisa diterapkan maka seharusnya adanya keterpaduan kelemahan dan ancaman antara undang undang, SDM dan korban agar restitusi tindak pidana perdagangan orang bisa diterapkan sehingga perlu di lihat juga kekuatan dan peluang yang ada yang akan dibahas dalam bahasan yang kedua.

Kebijakan yang ada oleh pembuat undang undang tersebut sudah jelas mengakomodir perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam Undang undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan khusus mengenai restitusi korban tindak pidana perdagangan orang ataupun kepada ahli warisnya yang ada. Seharusnya dengan kebijakan yang ada tersebut menjadikan suatu dasar acuan dalam pelaksanaan Restitusi.

Dari yang telah penulis uraikan di atas untuk dapat terpenuhinya restitusi dari pelaku kepada korban, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari korban dari tindak pidana perdagangan orang. Perlunya upaya dalam pemberian ganti kerugian patut dipahami untuk dapat terwujudnya restitusi atau ganti kerugian yang tidak mungkin apabila hanya pihak korban saja yang memperjuangkannya. Selain itu penegak hukum dapat mengkaji mengenai keterlibatan korban terhadap kejahatan tersebut dan kerugian sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Sebagai gambaran bagi penegak hukum untuk dalam menangani perkara perdagangan orang mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga keluarnya putusan dari majelis hakim yang menangani perkara.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Korban TKI diperbatasan Malaysia Entikong Kalbar, Agustus 2013

## **2. Bagaimana Seharusnya Restitusi dapat diterapkan kepada Pelaku untuk Korban Tindak Pidana Perdagangan orang berdasar pasal 48 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?**

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.<sup>5</sup>

Permohonan ganti rugi berupa restitusi dapat diajukan oleh korban melalui 2 cara :<sup>6</sup>

- a. Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidana ke Polisi setempat;
- b. Korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugiannya ke Pengadilan Negeri setempat

Restitusi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah mencakup : kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.<sup>7</sup>

Bahwa restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Dimuali dari saat dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penuntutan perkara tindak pidana perdagangan orang<sup>8</sup> Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.<sup>9</sup> Selanjutnya restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.<sup>10</sup> Pemberian restitusi dilakukan 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>11</sup> Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang

---

<sup>5</sup> Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, Hal 316.

<sup>6</sup> International Organization for Migration, op.cit., hlm. 52.

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 48 ayat (2).

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan AKP Agung Yudiawan, SH (Penyidik Polres Tanjung Pinang ) Januari 2014

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, op.cit, Pasal 48 ayat (4).

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 48 ayat (5).

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 48 ayat (6).

restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.<sup>12</sup> Diharapkan hakim dapat mempertimbangkan untuk memutus perkara secara profesional, ganti rugi/ restitusi yang menjadi hak korban melalui putusan hakim, mewajibkan pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk memberikan ganti rugi/ restitusi dimaksud kepada korban.

Soerjono soekanto menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang mungkin akan mempengaruhinya dan faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan yg terakhir faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta rasa karsa manusia.<sup>13</sup>

Seperti yang diungkapkan Soerjono soekanto dalam berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang sudah merupakan dalam suatu sistem dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang pada khususnya dan dikaitkan dengan beberapa sumber dan hasil penelitian jika dihubungkan dengan teori yang penulis pakai yaitu teori SWOT. Yaitu mulai dari analisis eksternal, internal sampai dengan penyusunan formulasi dan analisis strategi, pemilihan alternatif strategi dan pengambilan keputusan strategi yang sesuai untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang lebih baik dan yang positif. Maka pada jawaban permasalahan pertama yang termasuk dalam hal kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) mengapa restitusi belum bisa diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang maka pada permasalahan yang kedua penulis akan membahas faktor yang menjadi Kekuatan (*Strenght*) dan Peluang (*Oppurtunities*) sehingga dengan diketahuinya dua hal negatif dan positif tersebut dalam teori SWOT bertujuan untuk membuat suatu hal yang positif dengan menghilangkan Kelemahan dan Ancaman yang ada dan memfokuskan dalam hal kekuatan dan peluang yaitu :

- a. Adanya Peraturan Yang menjadi dasar dalam melakukan Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam PP Nomor 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; PP Nomor 3/2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan

---

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 48 ayat (7).

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 5

Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat; serta UU Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b. UU Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberi legitimasi secara hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat menjalankan amanah agar korban dan saksi dapat memperoleh keadilan serta perlindungan dalam setiap tahapan peradilan pidana.
- c. Adanya kasus perdagangan orang yang dikabulkan hak restitusi yang di putus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.Reg 1663/Pid/B/2008/PN TK, atas nama terdakwa Fitriyani Binti Muradi. Hak Restitusi yaitu 10 juta rupiah yang seharusnya bisa dijadikan contoh kepada penegak hukum diwilayah lain
- d. Mekanisme pengajuan tuntutan restitusi seharusnya dibuat oleh Korban dengan permintaan oleh korban atau ahli warisnya sedangkan penuntut umum menyampaikan bersama tuntutan dan penyidik sudah memasukkan saat dilakukan pemeriksaan, ataupun bisa dilakukan oleh LPSK dalam mengajukan atau menentukan besarnya kerugian korban hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban karena LPSK merupakan lembaga yang diberikan tugas dan wewenang khusus dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bantuan kepada korban atau ahli waris. Hal tersebut pernah terjadi di PN Tanjung Karang yang dalam prakteknya Penyidik sudah memasukkan restitusi mulai dari tahap penyidikan awal yaitu menanyakan kerugian yang diderita korban sedangkan dalam penghitungan berapa besar kerugiannya adalah bisa dilakukan oleh LPSK.
- e. Sebagai sebuah terobosan yang lahir dari konsep keadilan restoratif, restitusi merupakan angin segar bagi korban dalam penyelesaian suatu tindak pidana.
- f. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 98 KUHAP merupakan salah satu bentuk riil evolusi transformasi gagasan keadilan restoratif ke dalam hukum positif di Indonesia.

Permohonan restitusi itupun tidak lepas dari adanya syarat-syarat yang



harus dilampiri korban, diantaranya:<sup>14</sup>

- a. Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- d. Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
- e. Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai korban tindak pidana;
- f. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga;
- g. Surat kuasa khusus apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga.

Adapun peranan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menangani pengajuan restitusi oleh korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

#### 1. Peran Penyidik

Dalam melaporkan mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran Penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya : bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/ bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya (penjelasan Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara tindak pidana perdagangan orang di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi, diusulkan agar dibuatkan mekanisme petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dari internal kepolisian untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi

---

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 20 ayat (2).

Penyidik di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah berlaku sejak 19 April 2007.

## 2. Peran Penuntut Umum

Peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Perbedaan dengan ketentuan dalam Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian (Pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP), yang didalamnya terdapat perbedaan maupun persamaan dalam Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal-pasal KUHAP tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan (Pasal 98), perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan Pasal 48 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tercantumkannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban. Selain telah melakukan kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi penuntut umum diperlukan pula mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immateriel agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

## 3. Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiel terutama immateriel dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku

serta memberikan ganti rugi materiel maupun immateriel kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan legal justice, tetapi juga berdasarkan moral justice, karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/ pelaku tindak pidana, tetapi keadilan wajib juga diberikan kepada saksi dan/ atau korban, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim : berupa rasa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku. UUD' 45 menjamin masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) : — setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apabila korban ingin mengajukan dalam bentuk gugatan perdata di Pengadilan secara tersendiri, maka kepada korban masih diberikan kesempatan untuk mengajukan tersendiri permohonan restitusi melalui gugatan dalam perkara perdata. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bilamana pada waktu perkara pidananya sudah siap untuk diajukan dipersidangan, korban masih dalam taraf pengobatan dan memerlukan waktu penyembuhan lebih lama misalnya : amputasi, penyembuhan alat reproduksi) dan korban belum dapat mengajukan bukti-bukti pada waktu melaporkan perkara pidananya. Oleh karena itu, korban masih diberi kesempatan mengajukan ganti rugi setelah perkara pidananya diputus pengadilan. Pemberian ganti rugi berupa restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus (Pasal 48 ayat (5)). Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi di pengadilan dalam bentuk uang, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual) dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan Pengadilan tingkat pertama. Penjelasan Pasal 48 ayat 5 menunjukkan ketentuan bahwa pelaksanaan penitipan restitusi dilakukan dengan cara yang dilaksanakan dengan proses penanganan perkara perdata dalam konsinyasi (consignatie).

Pelaksanaan Pemberian Restitusi yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 49, yaitu:<sup>15</sup>

1. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
2. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
3. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Apabila ternyata pelaku bila tidak memenuhi perintah hakim untuk melaksanakan restitusi, maka dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur ketentuan tentang hal tersebut :<sup>16</sup>

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
2. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
3. Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
4. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, op.cit, Pasal.49.

<sup>16</sup> Ibid, Pasal.50

## **Penutup**

Dari yang telah penulis uraikan di atas untuk dapat terpenuhinya restitusi dari pelaku kepada korban, diperlukan keterpaduan para penegak hukum agar dapat meringankan beban dari korban dari tindak pidana perdagangan orang. Perlunya upaya dalam pemberian ganti kerugian patut dipahami untuk dapat terwujudnya restitusi atau ganti kerugian yang tidak mungkin apabila hanya pihak korban saja yang memperjuangkannya. Selain itu penegak hukum dapat mengkaji mengenai keterlibatan korban terhadap kejahatan tersebut dan kerugian sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Sebagai gambaran bagi penegak hukum untuk dalam menangani perkara perdagangan orang mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga keluarnya putusan dari majelis hakim yang menangani perkara. Selanjutnya, disamping upaya dari para penegak hukum, juga melibatkan beberapa pihak yang membantu meringankan psikologis korban, misalnya: lembaga advokasi perempuan dan anak yang membantu meringankan beban psikis korban.

Perlu dibuat peraturan pelaksanaan tersendiri mengenai restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, atau setidaknya dalam rangka mengisi ketiadaan peraturan pelaksanaan dari restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, karena dalam undang-undang no 21 tahun 2007 tidak mengatur jelas mekanisme pengajuan restitusi, dan juga seharusnya dibuat suatu pedoman teknis bagi penyidikan, penuntutan, dan hakim, sehingga para penegak hukum lebih berperan aktif dan maksimal terhadap upaya pemenuhan restitusi, adanya kesepakatan atau MOU antara penegak hukum yaitu polisi jaksa dan hakim dalam hal restitusi tindak pidana perdagangan orang.

Diperlukan adanya pelatihan keahlian penegak hukum terkait restitusi tindak pidana perdagangan orang pada khususnya dan juga kesadaran sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dari penegak hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang pada umumnya. Mengenai kendala dari kurangnya kesadaran pada penegak hukum itu sendiri, berkaitan dengan sebagaimana yang telah penulis bahas pada bagian faktor penegak hukum, maka diperlukan adanya peranan yang seimbang antara peranan yang diharapkan dan peranan yang actual.

Adanya kesadaran hukum korban. Korban kejahatan beranggapan seandainya melakukan tuntutan ganti rugi hasil yang ia dapatkan tidak sebanding

dengan yang ia alami (tidak bisa mengembalikan keadaan semula) bahkan ia juga beranggapan jika melakukan tuntutan ganti rugi justru akan menambah penderitaan dan mengalami kerugian lain sehingga mereka cenderung menjadi apatis. Perlu dilakukannya sosialisasi mengenai tindak pidana perdagangan orang dan adanya hak restitusi pada korban, yang dilakukan secara optimal pada masyarakat yang menjadi target dari aturan hukum, tidak hanya dengan memperkirakan bahwa masyarakat mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Warga masyarakat secara umum mampu mengetahui suatu aturan hukum dan isi dari aturan hukum tersebut, jika aturan hukum tersebut sudah disosialisasikan secara optimal oleh pejabat setempat.

## Daftar Pustaka

Angus McGilvary , *Data IOM dalam Training Penanganan Tindak Pidana perdagangan orang*, Hotel santika Pontianak 4-7 september 2012

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998,

Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi*, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006,

MardjonoReksodiputro,. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007

Masruchin Ruba'i, *Modul Pelatihan, Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berspektif Gender Oleh Jaksa dan Hakim*, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender, Universitas Brawijaya Malang, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hasil wawancara dengan AKP Agung Yudiawan, SH (Penyidik Polres Tanjung Pinang ) Januari 2014

Hasil wawancara dengan Korban TKI diperbatasan Malaysia Entikong Kalbar Agustus 2013